BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda melalui pertimbangannya sangat dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaaan, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 KUHP baik itu pidana penjara, kurungan dan atau denda, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana. Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani dengan melalui pertimbangan melalui yuridis (hukum), melalui kebenaran filosofis (keadilan) dan melalui sosiologis (kemasyarakatan).
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana denda dalam perkara pidana dilihat dari aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandelen*) dari suatu tindak pidana terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dan sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Sehingga pada prakteknya hakim sebelum pertimbangan yuridis pasti dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim

terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan, yang berorientasi pada dimensi *locus* dan *tempus delikti* dari tindak pidana yang dilakukan, penyebab atau latar belakang terdakwa sampai melakukan tindak pidana dan barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

3. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan pidana yang terdapat dalam putusan perkara pidana Nomor 430/Pid.C/2023/PN.Rap., pasti melalui pertimbangan yang telah dilakukan hakim dalam memeriksa perkara tersebut telah memberikan putusan pada Pasal 364 (1) KUHP, dan Perma No. 02 tahun 2012, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang bertalian dengan kasus pencurian tersebut yaitu, dengan menyatakan terdakwa I, Kurnia Sandi Alias Sandi dan Terdakwa II Muhammad Arifin Siregar Alias Ipin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” dan menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari sehingga terdakwa yang dijatuhi denda tersebut apabila dirinya merasa tidak mampu membayar denda, ia dapat segera menjalani kurungan pengganti denda tanpa harus menunggu batas waktu

membayar denda dan pendapatan yang diperoleh dari pidana denda menjadi milik negara.

B. Saran-saran

Maka adapun sebagai saran yang dapat diberikan dalam penelitian tesis ini antara lain:

1. Diharapkan bagi hakim sebagai *legal justice* dapat memutus setiap perkara pidana agar objectif melalui pertimbangan-pertimbangan yang ideal, agar nasib terpidana bisa memperoleh keadilan dan kepastian hukum dengan cara tidak hanya menitik beratkan kepada pidana penjara sebagai pemidanaan, akan tetapi pidana denda juga perlu untuk dipertimbangkan dalam setiap kasus pidana didalam KUHP.
2. Mestinya pemerintah dapat mengeluarkan dengan waktu dekat ini Peraturan Pemerintah tentang KUHP yang baru sebagai *legal standing* bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim karena KUHP yang sekarang sudah tidak dapat dijadikan rujukan yang ideal dalam membuat standarisasi melakukan mempertimbangkan melalui pemberian hukuman pidana denda bagi terpidana sehingga nominal pidana denda yang terdapat dalam KUHP yang lama belum dikonvensasi dengan keadaan kekinian sehingga KUHP baru dapat menjawab persoalan tindak pidana denda.
3. Penerapan sanksi pidana bagi terdakwa berupa pidana denda yang telah di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut sudah bisa melakukan gebrakan dengan baik melalui pertimbangannya, karena hakim saat ini jarang untuk menerapkan sanksi pidana denda bagi terdakwa, sehingga kedepan bagi para hakim agar lebih progresif untuk menerapkan pidana denda dalam menjatuhkan putusan.